



# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

# KATA PENGANTAR

---



**D**engan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Negeri Pontianak.

Pengadilan Negeri Pontianak sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kota Pontianak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai Tugas Pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2021 disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor : 3111/SEK/OT.01.2/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor W17-U/3230/OT.01.12/12/2021 tanggal 20 Desember 2021 Perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021. Sesuai surat tersebut maka data yang kami sajikan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 adalah terdiri dari komponen bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan (per tanggal 31 Desember 2021). Laporan Tahunan sebagai gambaran terpenuhinya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pontianak dalam 1 (satu) Tahun Anggaran berjalan sesuai basis kinerja yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 ini diharapkan bermanfaat dan memacu peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Pontianak untuk tahun-tahun yang akan datang.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan hidayahnya kepada kita semua, Amin.

Pontianak, 3 Januari 2022  
KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

PRANSIS SINAGA , S.H., M.H.  
NIP. 196302241992121001

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	I
<b>DAFTAR ISI .....</b>	II
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	IV
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	V
<b>BAB I .....</b>	1
<b>PENDAHULUAN.....</b>	1
A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN .....	1
B. VISI DAN MISI.....	3
C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) .....	3
<b>BAB II .....</b>	5
<b>KEADAAN PERKARA, .....</b>	5
<b>PENYELESAIAN PERKARA DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN) .....</b>	5
A. KEADAAN PERKARA TAHUN 2021 .....	5
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama .....	5
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	6
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.....	6
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	7
B. PENYELESAIAN PERKARA.....	8
1. Jumlah sisa perkara yang diputus .....	8
2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu .....	8
3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.....	9
4. Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi.....	9
5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui Diversi.....	9
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN) .....	10
1. Posbakum (Pos Pelayanan Hukum) .....	10
2. Sidang Keliling/Pelayan Terpadu .....	11
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) .....	11
D. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.....	11
<b>BAB III .....</b>	13
<b>SUMBER DAYA MANUSIA.....</b>	13
A. SUMBER DAYA MANUSIA.....	13
1. Mutasi.....	13
2. Promosi .....	14
3. Kenaikan Pangkat Per April/Okttober .....	15
4. Pegawai yang Pensiun .....	16

5. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis) .....	16
<b>BAB IV.....</b>	<b>19</b>
<b>PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI.....</b>	<b>19</b>
A. PENGELOLAAN KEUANGAN (REALISASI ANGARAN TEKNIS DAN NON TEKNIS).....	19
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA .....	21
1. Pengadaan.....	21
2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung.....	21
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	24
1. Implementasi e-Court di Lingkungan peradilan Umum.....	24
2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum .....	24
<b>BAB V.....</b>	<b>28</b>
<b>PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....</b>	<b>28</b>
A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU .....	28
B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) .....	31
C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK .....	32
<b>BAB VI.....</b>	<b>47</b>
<b>PENGAWASAN .....</b>	<b>47</b>
A. INTERNAL.....	47
B. EVALUASI .....	50
<b>BAB VII.....</b>	<b>51</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. KESIMPULAN .....	51
B. REKOMENDASI.....	52

# DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 1 Piagam Penghargaan WBK PN Pontianak .....	12
Gambar 2 Screenshot Key Indikator Perkara pertanggal 31 Desember 2021 .....	25
Gambar 3 Screenshot Status Perkara pertanggal 31 Desember 2021 .....	26
Gambar 4 Screenshot Capaian Rasio Penyelesaian Perkara .....	26
Gambar 5 Screenshot SIPP-MA.....	27
Gambar 6 Petikan Putusan Dirjen Badilum Tentang Nilai APM Pada PN Pontianak ..	29
Gambar 7 Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu PN Pontianak.....	30
Gambar 8 Petugas Meja PTSP .....	31
Gambar 9 Screenchot Aplikasi Sutera WA .....	33
Gambar 10 Screenshot Aplikasi Setara .....	35
Gambar 11 Screenchot Survey Kepuasan Masyarakat.....	36
Gambar 12 Screenshot Survey Persepsi Anti Korupsi.....	37
Gambar 13 Screenshot Dasboard SiSUPER .....	38
Gambar 14 Poster Aplikasi INDI.....	39
Gambar 15 Dashboard Bot INDI Menunjukkan Jumlah Percakapan Yang Masuk ....	40
Gambar 16 Kursi Roda dan Tongkat Bantu Jalan.....	41
Gambar 17 Toilet Khusus Penyandang Disabilitas .....	41
Gambar 18 Toilet Disabilitas Dilengkapi dengan Pegangan Rambat.....	41
Gambar 19 Area Tunggu Kursi Roda .....	42
Gambar 20 Kartu Antrean Prioritas .....	42
Gambar 21 Pintu Akses Prioritas .....	42
Gambar 22 Ruang Tamu Terbuka .....	43
Gambar 23 Kompensasi Pelayanan .....	43
Gambar 24 Brosur Pelayanan PTSP .....	43
Gambar 25 Wastafel Tempat Cuci Tangan Pengunjung .....	44
Gambar 26 Alat Detektor Suhu.....	44
Gambar 27 Ruang Kesehatan dan Laktasi.....	44
Gambar 28 Air Minum Gratis.....	45
Gambar 29 Kotak Saran .....	45
Gambar 30 Pemberitahuan Akses WiFi Gratis .....	45
Gambar 31 Ruang Pojok Baca dan TV Informasi.....	46
Gambar 32 Box Charger bagi Pengunjung .....	46
Gambar 33 Denah dan Jalur Evakuasi.....	46
Gambar 34 Data Hakim Pengawas Bidang .....	49

# **DAFTAR TABEL**

---

Tabel 1 Keadaan Perkara Tingkat Pertama .....	5
Tabel 2 Keadaan Perkara Tingkat Banding .....	6
Tabel 3 Keadaan Perkara Tingkat Kasasi .....	6
Tabel 4 Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	7
Tabel 5 Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus.....	8
Tabel 6 Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu.....	8
Tabel 7 Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali .....	9
Tabel 8 Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi .....	9
Tabel 9 Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi.....	9
Tabel 10 Tabel Data Mutasi Masuk Pegawai PN Pontianak .....	14
Tabel 11 Data Mutasi Keluar Pegawai PN Pontianak.....	15
Tabel 12 Data Kenaikan Pangkat Pegawai Per April/Okttober .....	15
Tabel 13 Data Pegawai Yang Pensiun.....	16
Tabel 14 Data Diklat Teknis Pegawai .....	17
Table 15 Data Diklat Non Teknis Pegawai .....	18
Tabel 16 Rekapitulasi Belanja Pegawai Pada Pengadilan Negeri Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat.....	20
Tabel 17 Rekapitulasi Belanja Barang Operasional Pada Pengadilan Negeri Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat .....	20
Tabel 18 Rekapitulasi Belanja Modal Pada Pengadilan Negeri Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat .....	20
Tabel 19 Rekapitulasi Belanja Barang Non Operasional Pada Pengadilan Negeri Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat .....	20
Tabel 20 Matrik Keadaan Kendaraan Dinas.....	21
Tabel 21 Matrik Keadaaan Rumah Dinas.....	22
Tabel 22 Matrik Keadaan Sarana/Prasarana .....	23

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

---

### **A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN**

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A mempunyai tugas pokok memeriksa, mengadili, dan memutus serta menyelesaikan perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 diperlukan usaha untuk mewujudkan sebuah Badan Peradilan yang Agung dengan:

- 1.** Melaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
- 2.** Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN;
- 3.** Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan tersuktur;
- 4.** Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposisional;
- 5.** Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan;
- 6.** Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional;
- 7.** Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan;
- 8.** Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi;
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu.

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, dengan dilandasi oleh rasa tanggung jawab dan kebersamaan, seluruh bagian-bagian dari Aparatur Teknis Judisial dan Non Teknis Judisial yang ada di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A telah bekerja keras dengan sungguh-sungguh dan saling mendukung satu sama lain, sehingga apa yang menjadi Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu "**Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung**" dapat tercapai.

Selain itu, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A telah mendapatkan predikat "Akreditasi A-Excellent", dalam Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sejak Juli Tahun 2018 dan Pengadilan Negeri Pontianak telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diserahkan secara online oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Tanggal 21 Desember 2020. Hal tersebut semakin menyemangati seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A untuk memberikan Pelayanan Yang Prima kepada pencari keadilan guna mewujudkan Pengadilan Negeri Pontianak yang "**MANTAP**" Melayani, Amanah, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Profesional.

## **B. VISI DAN MISI**

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A sebagai komponen penunjang keberhasilan proses Peradilan Tingkat pertama, Rencana Strategisnya mengacu pada kebijakan Mahkamah Agung RI, yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang tidak lepas dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

**VISI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK adalah :**  
**“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pontianak Yang Agung”**

**MISI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK adalah :**

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pontianak;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kep emimpinan di Pengadilan Negeri Pontianak;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Pontianak.

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut jelaslah memerlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi dan Rencana Strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang modern, yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, serta dapat tegaknya supremasi hukum.

## **C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Perencanaan strategi adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak harus didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana yang cukup

serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

### **1. Tujuan Strategis**

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sesuai dengan Visi dan Misi di atas, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan yang secara garis besar ditetapkan sebagai berikut:

- ❖ Terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan;
- ❖ Efektivitas Pelayanan Badan Peradilan;
- ❖ Peningkatan kepastian hukum dan transparansi pelayanan publik.

### **2. Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran strategis Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, yaitu:

- ❖ Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
- ❖ Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
- ❖ Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
- ❖ Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

## **BAB II**

# **KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)**

### **A. KEADAAN PERKARA TAHUN 2021**

#### **1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama**

NO.	JENIS PERKARA	SISA	MASUK	PUTUS	RASIO PENANGANAN PERKARA	SISA
1.	Perdata Gugatan/Bantahan	56	257	254	81,15 %	59
2.	Perdata Gugatan Sederhana	1	23	20	83,33 %	4
3.	Perdata Permohonan	-	873	867	99,31 %	6
4.	Perdata PHI	19	66	61	71,76 %	18
5.	Pidana Biasa	148	927	970	90,23 %	105
6.	Pidana Pra Peradilan	-	12	12	100 %	-
7.	Pidana Cepat	-	6	6	100 %	-
8.	Pidana Lalu Lintas	-	7539	7539	100 %	-
9.	Pidana Anak	-	18	18	100 %	-
10.	Pidana Perikanan	-	27	27	100 %	-
11.	Pidana Tipikor	10	91	67	66,33 %	34

Tabel 1 Keadaan Perkara Tingkat Pertama  
Sumber data diambil dari SIPP Pengadilan Negeri Pontianak



## 2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

NO.	JENIS PERKARA	SISA	MASUK	PUTUS	RASIO PENANGANAN PERKARA	SISA
1.	Perdata Gugatan/Bantahan	9	47	45	80,35 %	11
2.	Perdata Gugatan Sederhana	-	-	-	-	-
3.	Perdata Permohonan	-	-	-	-	-
4.	Perdata PHI	-	-	-	-	-
5.	Pidana Biasa	10	50	49	81,66 %	11
6.	Pidana Pra Peradilan	-	-	-	-	-
7.	Pidana Cepat	-	-	-	-	-
8.	Pidana Lalu Lintas	-	-	-	-	-
9.	Pidana Anak	-	-	-	-	-
10.	Pidana Perikanan	-	-	-	-	-
11.	Pidana Tipikor	-	11	10	90,90%	1

Tabel 2 Keadaan Perkara Tingkat Banding

Sumber data diambil dari SIPP Pengadilan Negeri Pontianak

## 3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

NO.	JENIS PERKARA	SISA	MASUK	PUTUS	RASIO PENANGANAN PERKARA	SISA
1.	Perdata Gugatan/Bantahan	39	37	9	11,84 %	67
2.	Perdata Gugatan Sederhana	-	-	-	-	-
3.	Perdata Permohonan	-	-	-	-	-
4.	Perdata PHI	21	30	24	47,058 %	27
5.	Pidana Biasa	22	27	7	14,28%	42
6.	Pidana Pra Peradilan	-	-	-	-	-
7.	Pidana Cepat	-	-	-	-	-
8.	Pidana Lalu Lintas	-	-	-	-	-
9.	Pidana Anak	-	-	-	-	-
10.	Pidana Perikanan	-	-	-	-	-
11.	Pidana Tipikor	7	6	7	53,84 %	6

Tabel 3 Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Sumber data diambil dari SIPP Pengadilan Negeri Pontianak

#### 4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

NO.	JENIS PERKARA	SISA	MASUK	PUTUS	RASIO PENANGANAN PERKARA	SISA
1.	<b>Perdata Gugatan/Bantahan</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>33,33%</b>	<b>10</b>
2.	<b>Perdata Gugatan Sederhana</b>	-	-	-	-	-
3.	<b>Perdata Permohonan</b>	-	-	-	-	-
4.	<b>Perdata PHI</b>	-	-	-	-	-
5.	<b>Pidana Biasa</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	-	<b>0 %</b>	<b>10</b>
6.	<b>Pidana Pra Peradilan</b>	-	-	-	-	-
7.	<b>Pidana Cepat</b>	-	-	-	-	-
8.	<b>Pidana Lalu Lintas</b>	-	-	-	-	-
9.	<b>Pidana Anak</b>	-	-	-	-	-
10.	<b>Pidana Perikanan</b>	-	-	-	-	-
11.	<b>Pidana Tipikor</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>20%</b>	<b>4</b>

Tabel 4 Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali  
Sumber data diambil dari SIPP Pengadilan Negeri Pontianak



## B. PENYELESAIAN PERKARA

### 1. Jumlah sisa perkara yang diputus

NO.	JENIS PERKARA	SISA	MASUK	PUTUS	SISA
1.	Perdata Gugatan/Bantahan	56	257	254	59
2.	Perdata Gugatan Sederhana	1	23	24	4
3.	Perdata Permohonan	-	873	867	6
4.	Perdata PHI	19	60	61	18
5.	Pidana Biasa	148	927	970	105
6.	Pidana Pra Peradilan	-	12	12	0
7.	Pidana Cepat	-	6	6	0
8.	Pidana Lalu Lintas	-	7539	7539	0
9.	Pidana Anak	-	18	18	0
10.	Pidana Perikanan	-	27	27	0
11.	Pidana Tipikor	10	91	67	34

Tabel 5 Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Sumber data diambil dari SIPP Pengadilan Negeri Pontianak

### 2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

NO.	JENIS PERKARA	JUMLAH
1.	Perdata Gugatan	254
2.	Perdata Gugatan Sederhana	24
3.	Perdata Permohonan	867
4.	Perdata PHI	61
5.	Pidana Biasa	970
6.	Pidana Pra Peradilan	12
7.	Pidana Cepat	6
8.	Pidana Lalu Lintas	7539
9.	Pidana Anak	18
10.	Pidana Perikanan	27
11.	Pidana Tipikor	67

Tabel 6 Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Sumber data diambil dari SIPP Pengadilan Negeri Pontianak

### 3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

NO.	JENIS PERKARA	BANDING	KASASI	PK
1.	Perdata Gugatan	209	219	247
2.	Perdata Gugatan Sederhana	20	20	20
3.	Perdata Permohonan	867	867	867
4.	Perdata PHI	61	31	-
5.	Pidana Biasa	922	943	961
6.	Pidana Pra Peradilan	12	12	12
7.	Pidana Cepat	6	6	6
8.	Pidana Lalu Lintas	7539	7539	7539
9.	Pidana Anak	18	18	18
10.	Pidana Perikanan	27	27	27
11.	Pidana Tipikor	56	61	65

Tabel 7 Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

Sumber data diambil dari SIPP Pengadilan Negeri Pontianak

### 4. Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi

Untuk perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Pontianak pada Tahun 2021 telah dilakukan Mediasi sebanyak 135 perkara, dengan rincian sebagai berikut;

NO.	SATKER	Akta Perdamaian	Berhasil	Cabut	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Masih berjalan
1.	Pengadilan Negeri Pontianak	5	-	2	119	4	5

Tabel 8 Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi

Sumber data diambil dari SIPP Pengadilan Negeri Pontianak

### 5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui Diversi

Untuk perkara Pidana Khusus Anak di Pengadilan Negeri Pontianak telah dilakukan Diversi sebanyak 2 perkara, dan yang berhasil dengan Diversi sebanyak 1 perkara;

NO.	SATKER	Jumlah Diversi	Berhasil
1.	Pengadilan Negeri Pontianak	2	1

Tabel 9 Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Sumber data diambil dari SIPP Pengadilan Negeri Pontianak

## **C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)**

### **1. Posbakum (Pos Pelayanan Hukum)**

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advokasi hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advokasi hukum atau pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan Negeri Pontianak.

Pengadilan Negeri Pontianak pada tahun 2021 mempunyai 1 (satu) Posbakum yaitu : LKKBH Universitas Panca Bhakti, sesuai Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Pontianak dengan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak tentang Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 4 Januari 2021;

Pagu Anggaran DIPA 099066 (01) untuk Posbakum sebesar Rp48.000.000,00



## **2. Sidang Keliling/Pelayan Terpadu**

Pengadilan Negeri Pontianak untuk Tahun 2021 tidak ada Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu.

## **3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)**

Pengadilan Negeri Pontianak untuk Tahun 2021 tidak ada Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) dikarenakan tidak ada alokasi anggaran tersebut.

## **D. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor 58/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Mahkamah Agung R.I dan 4 (empat) Badan Peradilan dibawahnya.



Gambar 1 Piagam Penghargaan WBK PN Pontianak

Sebagai implementasi Surat Keputusan tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak selaku salah satu satker dibawah Mahkamah Agung R.I telah ditetapkan sebagai salah satu satker Mandatori yang diusulkan untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dan untuk itu Pengadilan Negeri Pontianak telah melakukan pembangunan Zona Integritas sejak awal tahun 2019 dan telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Nasional Kemenpan RB pada 13 Nopember 2020 dan telah berhasil mempertahankan yang dibangun sehingga berhasil mendapat Apresiasi Piagam Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan menuju WBBM dari Kemenpan Reformasi Birokrasi R.I.

## **BAB III**

# **SUMBER DAYA MANUSIA**

### **A. SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **1. Mutasi**

Pada tahun 2021, terdapat 18 (delapan belas) orang Personil yang mutasi masuk pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan penjelasan sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	H. AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.	Ketua PN. Sampit	Wakil Ketua PN. Pontianak
2.	TRI RETNANINGSIH, S.H.	Hakim PN Ungaran	Hakim PN. Pontianak
3.	YAMTI AGUSTINA, S.H.	Hakim PN Magelang	Hakim PN. Pontianak
4.	UDUT WIDODO KUSMIRAN NAPITUPULU, S.H., M.H.	Hakim PN Lubuk Pakam	Hakim PN. Pontianak
5.	RETNO LASTIANI, S.H., M.H.	Hakim PN Kendal	Hakim PN. Pontianak
6.	DENY IKHWAN, S.H., M.H.	Hakim PN Porwokerto	Hakim PN. Pontianak
7.	KURNIA DIANTA GINTING, S.H.	Hakim PN Klaten	Hakim PN. Pontianak
8.	AGUS ANIWANTO, S.H.	Hakim Ad Hoc Perikanan PN Tual	Hakim Ad Hoc Perikanan PN Pontianak
9.	EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Tipikor PN Ternate	Hakim Ad Hoc Tipikor PN Pontianak
10.	Ir. GATOT RUDIYONO, S.H., M.M.		Hakim Ad Hoc Perikanan PN Pontianak
11.	Dr. NOVA YUNIARTI, S.Pi., M.P.		Hakim Ad Hoc Perikanan PN Pontianak
12	ATUN BUDI ASTUTI, S.H.		Hakim Ad Hoc Tipikor PN Pontianak
13.	UTIN REZA PUTRI, S.H., M.H.	Panitera PN. Karawang	Panitera PN Pontianak
14.	SYUAIDI, S.H.	Panitera Muda Pidana PN Ngabang	Panitera Muda Perdata PN Pontianak

15.	KUSUMA AGUS CAHYONO, S.H.	Panitera Pengganti PN Sintang	Panitera Pengganti PN. Pontianak
16.	URAY HERRY YANIZAR	Jurusita PN. Singkawang	Jurusita PN. Pontianak
17.	DONNY PRADIPTA, A.Md.Kom.	CPNS PN. Pontianak	
18.	CHORRY IGA SETYANINGRUM, A.Md.	CPNS PN. Pontianak	

Tabel 10 Tabel Data Mutasi Masuk Pegawai PN Pontianak

## 2. Promosi

Pada tahun 2021, terdapat 14 (empat belas) orang Pegawai yang mutasi keluar dari Pengadilan Negeri Pontianak, dengan penjelasan sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Dr. H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.	Wakil Ketua PN. Pontianak	Ketua PN. Gorontalo
2.	BONNY SANGGAH, S.H. M.Hum	Hakim PN. Pontianak	Hakim PT. Jayapura
3.	MARYONO, S.H., M.Hum	Hakim PN. Pontianak	Hakim PN.Jakarta Utara
4.	RICHMOND P. B SITORES, S.H., M.H.	Hakim PN. Pontianak	Hakim PN. Surakarta
5.	RIYA NOVITA, S.H., M.H.	Hakim PN. Pontianak	Wakil Ketua PN. Painan
6.	MARLIN SIMANJUNTAK, S.H., M.H.	Panitera PN. Pontianak	Panitera PN. Jakarta Timur
7.	M. ISYA, S.H.	Panitera Muda Perdata PN. Pontianak	Panitera PN. Ngabang
8.	DIAH PURWADANI, S.H.	Panitera Muda Tipikor PN. Pontianak	Panitera PN. Sanggau
9.	SYAHRIR RIZA, S.H.	Panitera Pengganti PN. Pontianak	Panitera Muda Pidana PN. Pontianak
10.	IRSANDI SUSILA ADJIE, S.H., M.H.	Panitera Pengganti PN. Pontianak	Panitera Muda Tipikor PN. Pontianak
11.	NUR TAUFIK HIDAYAT, S.E.	Pengelola Perkara PN. Pontianak	Jurusita Pengganti PN. Pontianak
12.	MUHAMMAD ZAINUL RAHMAN, S.Kom	Staf PN. Pontianak	Pranata Komputer Ahli Pertama PN. Pontianak

<b>13.</b> TIA AYU PRAMITA, S.H.	Pengelola Kepegawaian PN. Pontianak	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur PN. Pontianak
<b>14.</b> SUCI NURVITRI	Pengadministrasi Registrasi Perkara Perdata PN. Pontianak	Pengadministrasi Registrasi Perkara PHI PN. Pontianak

Tabel 11 Data Mutasi Keluar Pegawai PN Pontianak

### 3. Kenaikan Pangkat Per April/Okttober

Pada tahun 2021, terdapat 11 (sebelas) orang Pegawai yang naik Pangkat per April/Okttober pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan penjelasan sebagai berikut :

NO.	NAMA	PANGKAT/ GOL.RUANG	KENAIKAN PANGKAT	JENIS KENAIKAN PANGKAT
<b>1.</b>	<b>PRANSIS SINAGA, S.H., M.H.</b>	<b>Pembina Utama Muda (IV/c)</b>	<b>Pembina Utama Madya (IV/d)</b>	<b>Reguler</b>
<b>2.</b>	<b>RICHMOND P. B SITOROES,SH.MH</b>	<b>Pembina Tk. I (IV/b)</b>	<b>Pembina Utama Muda (IV/c)</b>	<b>Reguler</b>
<b>3.</b>	<b>RIYA NOVITA, S.H., M.H.</b>	<b>Pembina (IV/a)</b>	<b>Pembina Tk. I (IV/b)</b>	<b>Reguler</b>
<b>4.</b>	<b>RENDRA. S.H., M.H.</b>	<b>Pembina (IV/a)</b>	<b>Pembina Tk. I (IV/b)</b>	<b>Reguler</b>
<b>5.</b>	<b>MOCH. ICHWANUDIN, S.H., M.H.</b>	<b>Pembina (IV/a)</b>	<b>Pembina Tk. I (IV/b)</b>	<b>Reguler</b>
<b>6.</b>	<b>NIKO HENDRA SARAGIH, S.H., M.H.</b>	<b>Penata Tk. I (III/d)</b>	<b>Pembina (IV/a)</b>	<b>Reguler</b>
<b>7.</b>	<b>HENDRA AZWAR, S.H.</b>	<b>Penata (III/c)</b>	<b>Penata Tk. I (III/d)</b>	<b>Reguler</b>
<b>8.</b>	<b>HERI ISMAIL, S.H.</b>	<b>Penata Muda Tk. I (III/b)</b>	<b>Penata (III/c)</b>	<b>Reguler</b>
<b>9.</b>	<b>RATNA MARHAMAH HARAHP, S.H.</b>	<b>Penata Muda Tk. I (III/b)</b>	<b>Penata (III/c)</b>	<b>Reguler</b>
<b>10.</b>	<b>TIA AYU PRAMITA, S.H.</b>	<b>Penata Muda (III/a)</b>	<b>Penata Muda Tk. I (III/b)</b>	<b>Reguler</b>
<b>11.</b>	<b>SUCI NURVITRI</b>	<b>Pengatur Tk. I (III/d)</b>	<b>Penata Muda (III/a)</b>	<b>Reguler</b>

Tabel 12 Data Kenaikan Pangkat Pegawai Per April/Okttober

#### **4. Pegawai yang Pensiun**

Pada tahun 2021, terdapat 3 (tiga) orang Aparatur Sipil Negara yang pensiun pada Pengadilan Negeri Pontianak.

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	TMT PENSIUN
1.	SUHADA PUTRALIA	Pengelola Persuratan	01 April 2021
2.	ELYANUR	Panitera Pengganti	01 Mei 2021
3.	HERI ISMAIL, S. H.	Jurusita	01 Juni 2021

Tabel 13 Data Pegawai Yang Pensiun

#### **5. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis)**

NO.	JENIS DIKLAT TEKNIS	NAMA PESERTA
1.	Workshop Eksplorasi Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), 16 s.d 19 Maret 2021, Virtual Zoom Meeting	- Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, SH, MH - Dr. Riya Novita, SH, MH. - Rendra SH, MH - Moch. Ichwanudin, SH, MH
2.	Pelatihan Sertifikasi Niaga Kepailitan dan PKPU bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia, 12 April s.d 25 Mei 2021, Metode Online Mandiri dan Class	Narni Priska Faridayanti, SH, MH
3.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum Gelombang 3 Seluruh Indonesia, 26 Juli s.d 24 Agustus 2021, Metode Online Mandiri dan Class	Moch. Ichwanudin, SH, MH
4.	Bimtek SIPP, Biaya Perkara, E-Litigasi (e-Court), serta SPPT-TI pada Peradilan Umum Sewilayah Kallimantan Barat Tahun Anggaran 2021, 23 s.d 25 Agustus 2021, di Hotel Mercure Pontianak	- Marlin Simanjuntak, SH, MH - Syuaidi, SH - Syahrir Riza, SH
5.	Pelatihan Sertifikasi Mediator Gelombang 4 Bagi Panitera Lingkungan Peradilan Umum	Marlin Simanjuntak, SH, MH

<p style="text-align: center;"><b>Seluruh Indonesia, 23 Agustus s.d 22 September 2021</b></p>		
6.	Pelatihan Sertifikasi Perikanan bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia, 23 Agustus s.d 20 September 2021, Metode Online Mandiri dan Class	- Niko Hendra Saragih, SH, MH - Deny Ikhwan, SH, MH - Dewi Apriyanti, SH, MH
7.	Pelatihan Singkat Calon Panitera/Calon Panitera Muda Niaga Seluruh Indonesia, 27 Oktober s.d 5 November 2021, Metode Onlie Class)	Marlin Simanjuntak, SH, MH
8.	Rapat Koordinasi Satgas SIPP Tahun Anggaran 2021, 3 s.d 6 November 2021, Courtyard By Marriot Seminyak, Kuta, Bali	H. Ahmad Fijarsyah Joko Sutrisno, SH, MH
9.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XV, 1 November s.d 1 Desember 2021, Metode Online Mandiri dan Metode Classical	- Dewi Apriyanti, SH, MH - Niko Hendra Saragih, SH, MH
10.	Pelatihan Advanced Bagi Hakim Anak Lingkungan Peradilan Umum Tahap 2 Kelas Klasikal/Tatap Muka, 18 November s.d 1 Desember 2021, Metode Online Learning dan Class	Moch. Nur Azizi, SH

Tabel 14 Data Diklat Teknis Pegawai

NO.	JENIS DIKLAT NON TEKNIS	NAMA PESERTA
1.	Pelatihan Online Basic Booklet Indesign With Adobe Indesign 16 dari tempat tugas tahun 2021, 9 s.d 14 Agustus 2021, Metode Online Class	Tia Ayu Pramita, SH
2.	Bimtek Kepegawaian dan Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Tahun Anggaran 2021, 25 s.d 27 Agustus 2021, Hotel Mercure Pontianak	- Umiyati, SH - Fitriyani
3.	Pelatihan Dasar (Latsar) Calon PNS Golongan II Mahkamah Agung RI Gelombang II Angkatan I s.d XII secara Online, 21 Juli s.d 15 Oktober 2021, Metode Online Class	- Chorry Iga Setyaningrum, A.Md - Donny Pradipta, A.Md.Kom
4.	Rapat Koordinasi Teknologi Informasi Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2021, 26 s.d 28 Desember 2021, Hotel Arya Duta Jakarta	Chorry Iga Setyaningrum, A.Md

Table 15 Data Diklat Non Teknis Pegawai

## **BAB IV**

# **PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

---

### **A. PENGELOLAAN KEUANGAN (REALISASI ANGARAN TEKNIS DAN NON TEKNIS)**

Pada Tahun 2021 ini, Pengadilan Negeri Pontianak mendapatkan pagu anggaran dari DIPA Badan Urusan Administrasi sebesar Rp13.909.375.000.00 (Tiga belas milyar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan alokasi untuk belanja pegawai sebesar Rp11.240.684.000.00 (Sebelas milyar dua ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), belanja barang sebesar Rp2.238.531.000.00 ( Dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan belanja modal sebesar Rp430.160.000.00( Empat ratus tiga puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) serta dari pagu anggaran DIPA Dirjen Badilum sebesar Rp487.830.000.00 (Empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan alokasi untuk belanja barang;

#### **Program Dukungan Manajemen**

##### **1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.**

Layanan Perkantoran

- ❖ Gaji dan Tunjangan
- ❖ Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Layanan Umum

- ❖ Non Operasional Satker Daerah

##### **2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.**

Layanan Sarana Internal

- ❖ Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- ❖ Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

**a. Belanja Pegawai (dilampirkan matrik terlampir)**

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	<b>PENGADILAN NEGERI PONTIANAK</b>	<b>11.240.684.000</b>	<b>11.160.384.557</b>	<b>79.299.443</b>	<b>99,29%</b>

Tabel 16 Rekapitulasi Belanja Pegawai Pada Pengadilan Negeri Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat

**b. Belanja Barang Operasional (dilampirkan matrik terlampir)**

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	<b>PENGADILAN NEGERI PONTIANAK</b>	<b>2.238.531.000</b>	<b>2.209.270.907</b>	<b>29.260.093</b>	<b>98,69%</b>

Tabel 17 Rekapitulasi Belanja Barang Operasional Pada Pengadilan Negeri Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat

**c. Belanja Modal (dilampirkan matrik terlampir)**

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	<b>PENGADILAN NEGERI PONTIANAK</b>	<b>430.160.000</b>	<b>422.160.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>98,14%</b>

Tabel 18 Rekapitulasi Belanja Modal Pada Pengadilan Negeri Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat

**d. Belanja Barang Non Operasional Dipa Badilum (dilampirkan matrik terlampir)**

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	<b>PENGADILAN NEGERI PONTIANAK</b>	<b>487.830.000</b>	<b>483.142.999</b>	<b>4.687.001</b>	<b>99,04%</b>

Tabel 19 Rekapitulasi Belanja Barang Non Operasional Pada Pengadilan Negeri Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat

## B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

### 1. Pengadaan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung pada Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :

- ❖ Pengadaan Perangkat Alat Pengolah Data dan Komunikasi berupa PC Kepaniteraan sebanyak 3 (tiga) unit, Mesin Antrian Sidang 1 (satu) set, Ruang Sidang Online 1 (satu) set, Teleconference 2 (dua) unit, Kursi Ruang Tunggu 12 (dua belas) unit, dan AC Split 2 PK sebanyak 4 (empat) unit.

### 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Untuk Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun Anggaran 2021 terdiri dari pemeliharaan :

- ❖ Gedung Pengadilan Negeri, Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan halaman.
- ❖ Rumah Dinas.
- ❖ Peralatan dan Mesin (Genset,Kendaraan Roda Empat, roda dua, PC, Printer, AC split, Laptop, Inventaris kantor dan genset).

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>I Jenis Kendaraan Roda 4</b>						
1	Sedan	2005	✓			
2	Sedan	2006	✓			
3	Minibus	2011	✓			
4	Minibus	2001		✓		
5	Minibus	2018	✓			
<b>II Jenis Kendaraan Roda 2</b>						
1	MegaPro	2009	✓			
2	MegaPro	2011	✓			
3	Supra X-125	2005	✓			
4	Supra X-125	2005	✓			

Tabel 20 Matrik Keadaan Kendaraan Dinas

No	Uraian	Jumlah	RUMAH DINAS			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>I Rumah Dinas</b>						
1	Rumah Dinas Ketua	1		✓		
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1		✓		
3	Rumah Dinas Hakim	9		✓		
4	Rumah Dinas Panitera	1		✓		
5	Rumah Dinas Sekretaris	1	-	✓	-	-

Tabel 21 Matrik Keadaaan Rumah Dinas

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
<b>I Sarana / Prasarana Ruang</b>			
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Umum	6	
7	Ruang Sidang Anak	1	
8	Ruang Mediasi/Diversi	1	
9	Ruang Tunggu Anak	1	
10	Perpustakaan	1	
11	Ruang Arsip Perkara	2	
12	Ruang Tahanan Pria Dewasa	2	
13	Ruang Tahanan Wanita Dewasa	1	
<b>II Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>			
1	Stationary Generating Set	1	
2	Scanner (Universal Tester)	6	
3	Cermin Besar	4	
4	A.C. Split	45	
5	Alat Detektor Barang Terlarang/X Ray	0	
6	CCTV - Camera Control Television System	3	
7	Filing Cabinet Besi	41	
8	Lap Top	22	
9	P.C Unit	47	

<b>10</b>	<b>Printer</b>	<b>20</b>
<b>11</b>	<b>Mesin Ketik Manual</b>	<b>15</b>
<b>12</b>	<b>Lemari Besi Metal</b>	<b>47</b>
<b>13</b>	<b>Lemari Kayu</b>	<b>12</b>
<b>14</b>	<b>Rak Besi</b>	<b>22</b>
<b>15</b>	<b>Rak Kayu</b>	<b>2</b>
<b>16</b>	<b>Filling Cabinet Besi</b>	<b>41</b>
<b>17</b>	<b>Brankas</b>	<b>2</b>
<b>18</b>	<b>Mesin Absensi (Finger Print)</b>	<b>2</b>
<b>19</b>	<b>Meja Kerja Kayu</b>	<b>103</b>
<b>20</b>	<b>Kursi Besi Metal</b>	<b>192</b>
<b>21</b>	<b>Kursi Kayu</b>	<b>73</b>
<b>22</b>	<b>Sice</b>	<b>10</b>
<b>23</b>	<b>Bangku Panjang Besi</b>	<b>10</b>
<b>24</b>	<b>Bangku Panjang Kayu</b>	<b>36</b>
<b>25</b>	<b>Meja Pelayanan</b>	<b>1</b>
<b>26</b>	<b>Televisi</b>	<b>5</b>
<b>27</b>	<b>Sound System</b>	<b>2</b>
<b>28</b>	<b>Camera Digital</b>	<b>1</b>
<b>29</b>	<b>PABX</b>	<b>2</b>
<b>30</b>	<b>Fax</b>	<b>2</b>
<b>31</b>	<b>Server</b>	<b>1</b>
<b>32</b>	<b>Router</b>	<b>2</b>
<b>33</b>	<b>Rak Server</b>	<b>1</b>

Tabel 22 Matrik Keadaan Sarana/Prasarana

## **C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI**

### **1. Implementasi e-Court di Lingkungan peradilan Umum**

Salah satu program prioritas Nasional pada Mahkamah Agung adalah Aplikasi e-court yaitu pendaftaran perkara perdata yang dilakukan secara online, Pengadilan Negeri Pontianak dalam upaya mendukung program tersebut telah melakukan Upgrade Aplikasi SIPP, Kepemilikan Virtual Account Bank guna mendukung proses e-paymen pada Aplikasi e-court, mendisiplinkan kewenangan semua pengguna SIPP sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, menginput kembali biaya perkara, melaksanakan Sosialisasi e-court yang mana Pengadilan Negeri Pontianak telah mengundang dari berbagai unsur antara lain Advokat, Posbakum, Kejaksaan dan Masyarakat Umum.

Di tahun 2021 semua perkara Perdata baik gugatan umum, gugatan sederhana maupun permohonan sudah dilakukan dengan pendaftaran melalui e-court, dengan rincian sebagai berikut :

1. Perkara Gugatan Umum : 257 Perkara;
2. Perkara Gugatan Sederhana : 23 Perkara;
3. Perkara Permohonan : 873 Perkara;

### **2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum**

Dengan adanya aplikasi SIPP bertujuan untuk memudahkan para pencari keadilan dan masyarakat yang memerlukan perkembangan informasi perkembangan perkara yang ditangani oleh tiap-tiap Pengadilan, yang salah satunya adalah menginput data dengan tepat waktu dan akurat.

Berikut adalah Keadaan dan statistik perkara pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk bulan Desember 2021 sebagai berikut :

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penyelesaian Perkara	Sisa	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Eksesi	Orazi
1	Gugatan	74	16	34	100,00 %	50	11	1	1	1	-
2	Permohonan	31	57	52	143,86 %	6	-	-	-	-	-
3	Kepailitan	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
5	Hak Kekayaan Intelektual	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
6	Pengadilan Hubungan Industrial	30	1	13	1.300,00 %	18	-	3	-	-	-
7	Perlakuan/Bantahan (derden verzet)	1	-	-	0,00 %	1	-	-	-	-	-
8	Gugatan Sederhana	6	5	7	140,00 %	4	-	-	-	-	-
9	Permohonan Konsinyasi	1	-	-	0,00 %	1	-	-	-	-	-
10	KPPU	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
11	Pidana Biasa	142	41	78	190,24 %	105	1	2	-	-	-
12	Pidana Singkat	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
13	Pidana Cepat	-	1	1	100,00 %	-	-	-	-	-	-
14	Perkara Lalu-Lintas	-	365	365	100,00 %	-	-	-	-	-	-
15	Tindak Pidana Korupsi	31	0	5	62,50 %	34	1	-	-	-	-
16	Pidana Anak	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
17	Pidana Propradilan	1	-	1	100,00 %	-	-	-	-	-	-

Gambar 2 Screenshot Key Indikator Perkara pertanggal 31 Desember 2021

No	Status	Terlambat	Normal	Total
1	Perkara Yang Belum Penetapan Majelis Hakim/Hakim Gugatan	4	-	4
2	Perkara Yang Belum Kesepakatan Mediasi Gugatan	3	6	9
3	Perkara Yang Belum Putusan Gugatan	5	55	58
4	Perkara Yang Belum Minutai Gugatan	1	-	1
5	Perkara Yang Belum Pemberitahuan Permohonan Banding Gugatan	31	2	33
6	Perkara Yang Belum Pengiriman Berkas Banding Gugatan	22	9	31
7	Perkara Yang Belum Putusan Banding Gugatan	4	12	16
8	Perkara Yang Belum Pemberitahuan Putusan Banding Gugatan	10	5	15
9	Perkara Yang Belum Penyerahan Memori Kasasi Gugatan	10	1	11
10	Perkara Yang Belum Putusan Kasasi Gugatan	52	16	68
11	Perkara Yang Belum Pemberitahuan Putusan Kasasi Gugatan	7	-	7
12	Perkara Yang Belum Pemberitahuan Putusan PK Gugatan	1	-	1

No	Status	Terlambat	Normal	Total
1	Perkara Yang Belum Putusan Permohonan	-	6	6

No	Status	Terlambat	Normal	Total
1	Perkara Yang Belum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial	-	18	18

No	Status	Terlambat	Normal	Total
1	Perkara Yang Belum Pemberitahuan Permohonan Banding Perlakuan/Bantahan (derden verzet)	1	-	1
2	Perkara Yang Belum Pemberitahuan Permohonan Banding Perlakuan/Bantahan (derden verzet)	1	-	1
3	Perkara Yang Belum Pengiriman Berkas Banding Perlakuan/Bantahan (derden verzet)	2	-	2

STATUS DARI PERKARA GUGATAN SEDERHANA				
No	Status	Terimbang	Normal	Total
1	Perkara Yang Belum Putusan Gugatan Sederhana	-	4	4
2	Perkara Yang Belum Minutasi Gugatan Sederhana	-	1	1
STATUS DARI PERKARA PERMOHONAN KONSINYASI				
No	Status	Terimbang	Normal	Total
1	Perkara Yang Belum Penetapan Majelis Hakim/Hakim Permoahan Konsinyasi	1	-	1
2	Perkara Yang Belum Putusan Permoahan Konsinyasi	-	1	1
STATUS DARI PERKARA PIDANA BIASA				
No	Status	Terimbang	Normal	Total
1	Perkara Yang Belum Penetapan Hari Sidang Pertama Pidana Biasa	1	-	1
2	Perkara Yang Belum Putusan Pidana Biasa	1	104	105
3	Perkara Yang Belum Minutasi Pidana Biasa	-	2	2
4	Perkara Yang Belum Femberitahuan Permoahan Banding Pidana Biasa	26	1	27
5	Perkara Yang Belum Pengiriman Berkas Banding Pidana Biasa	2	1	3
6	Perkara Yang Belum Putusan Banding Pidana Biasa	3	1	4
7	Perkara Yang Belum Femberitahuan Putusan Banding Pidana Biasa	-	1	1
STATUS DARI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI				
No	Status	Terimbang	Normal	Total
1	Perkara Yang Belum Putusan Tindak Pidana Korupsi	-	34	34
2	Perkara Yang Belum Femberitahuan Permoahan Banding Tindak Pidana Korupsi	-	1	1
3	Perkara Yang Belum Pengiriman Berkas Banding Tindak Pidana Korupsi	-	1	1
4	Perkara Yang Belum Putusan Banding Tindak Pidana Korupsi	1	1	2
5	Perkara Yang Belum Femberitahuan Putusan Banding Tindak Pidana Korupsi	-	2	2
STATUS DARI PERKARA PIDANA PERIKANAN				
No	Status	Terimbang	Normal	Total
1	Perkara Yang Belum Femberitahuan Permoahan Banding Pidana Perikanan	1	-	1
2	Perkara Yang Belum Putusan Banding Pidana Perikanan	1	-	1

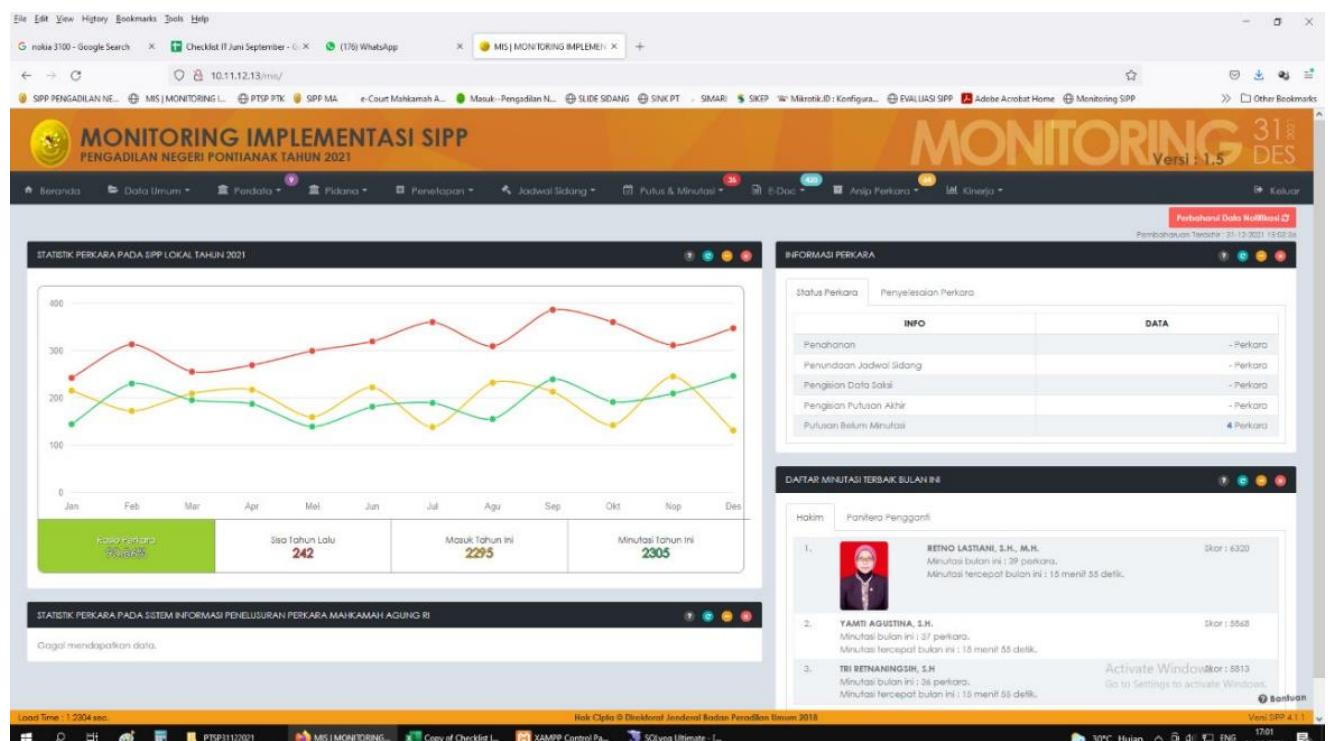
Load Time : 0.0791 Sec. | Memory Available: 128MB | Memory Usage : 44.45 MB

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2018

User Online | Versiion 4.1.1

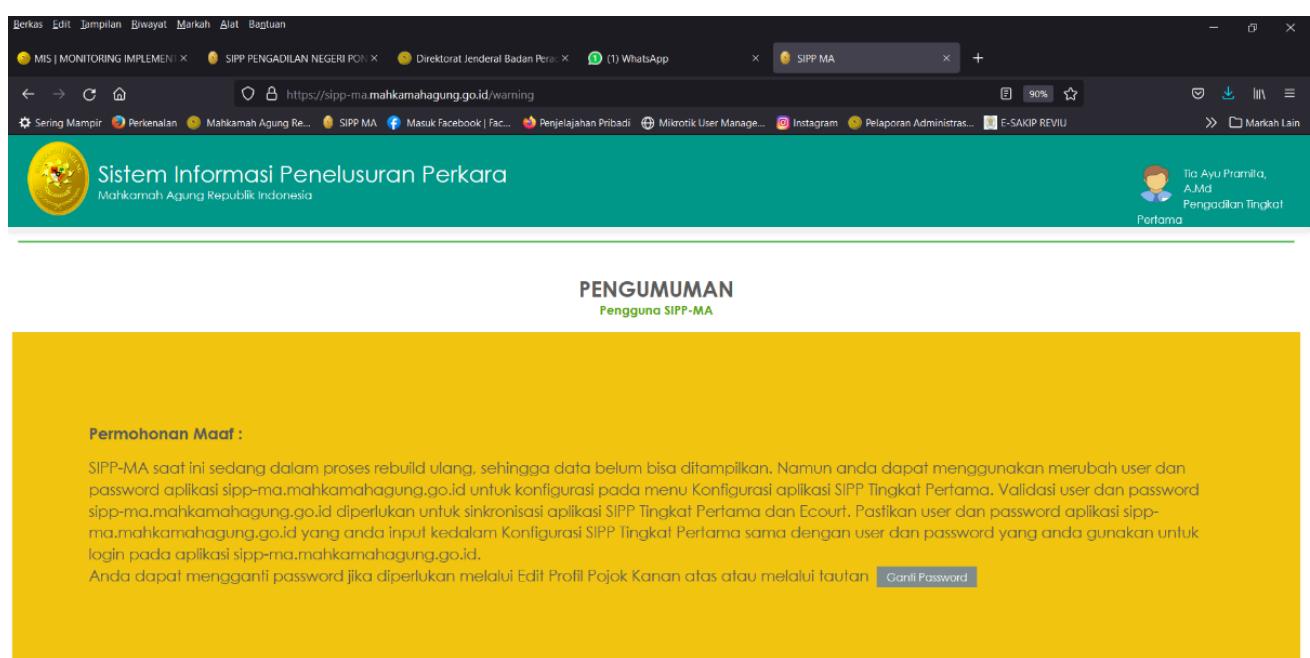
Gambar 3 Screenshot Status Perkara pertanggal 31 Desember 2021

Capaian rasio penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Pontianak dari bulan Januari sampai tanggal 31 Desember 2021 yaitu 90.86% dengan rincian sisa tahun lalu 242 perkara masuk tahun ini 2295 minutasi tahun ini 2305 perkara sisa tahun ini 232 perkara.



Gambar 4 Screenshot Capaian Rasio Penyelesaian Perkara

Capaian rasio penyelesaian perkara untuk bulan Januari sampai tanggal 31 Desember 2021 di Mahkamah Agung belum dapat ditampilkan dikarenakan SIPP-MA saat ini sedang dalam proses rebuild ulang, sehingga data belum bisa ditampilkan.



Gambar 5 Screenshot SIPP-MA

## **BAB V**

# **PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

---

### **A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU**

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan pembaruan untuk mewujudkan pengadilan yang agung (*Court of Excellence*). Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035. Cetak Biru ini merupakan penyempurnaan dari Cetak Biru yang diterbitkan tahun 2003, guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Penyusunan Cetak Biru ini dengan menggunakan pendekatan kerangka pengadilan yang unggul (*The Framework of Courts Excellence*). Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) area "Peradilan yang Agung" yang dibagi ke dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu : pengarah/pengendali (*driver*), sistem dan penggerak (*system and enabler*), dan hasil (*result*).

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A berdasarkan penilaian tim Badilum telah mendapat Akreditasi A "Excellent" namun demikian Pengadilan Negeri Pontianak juga tidak lepas dari adanya kritikan atas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A telah melakukan upaya-upaya perbaikan di segala unit. Menyikapi tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A terus giat melakukan pemberhanan perbaikan sistem kerja yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta telah memiliki Standar Pelayanan yang sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan

menyeluruh diperlukan langkah pembaruan dengan metode yang taktis sistematis.

Perbaikan sistem kerja ini, atau sebut saja peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI di tingkat unit kerja peradilan tingkat pertama, dan sekaligus merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi agenda nasional di tingkat Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.



Gambar 6 Petikan Putusan Dirjen Badilum Tentang Nilai APM Pada PN Pontianak

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A perlu memiliki sistem manajemen mutu, yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna pengadilan dengan peraturan yang sesuai. Salah satu dokumen mutu yang

perlu disusun dalam rangka memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu adalah manual mutu. Hal tersebut menjadi salah satu dasar pembuatan Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu STANDARD AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM - ICPE Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.



Gambar 7 Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu PN Pontianak

## B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, terus berupaya untuk mewujudkan kepuasan para pencari keadilan, salah satunya dengan menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gated Integrated Service), yang terdiri dari Pelayanan Kepaniteraan dan Pelayanan Kesekretariatan, yang terdiri dari :

- ❖ 6 (enam) Pelayanan Kepaniteraan, yaitu Pidana, Perdata, Hukum, Tipikor, Perikanan dan PHI;
- ❖ 1 (satu) Pelayanan Kesekretariatan, yaitu Umum.
- ❖ 1 (satu) meja petugas e-court
- ❖ 1 (satu) meja inzage



Gambar 8 Petugas Meja PTSP

## C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Apa itu Pelayanan Publik?

Pelayan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A terus berupaya meningkatkan pelayanan publik yang bertujuan untuk memberikan kemudahan serta kepuasan bagi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada tahun 2019 dan tahun 2020 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A telah membuat inovasi-inovasi yang berkaitan dengan pelayan publik, diantaranya Aplikasi Sutera Wa (Surat Keterangan waris), Setara (Surat Keterangan Perkara), aplikasi Survey dan Informasi Harian Pengadilan (INDI/whatsApp bot).

### ❖ **Aplikasi Sutera Wa**

Dalam mendukung Pelayanan Publik di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, Aplikasi Sutera Wa merupakan aplikasi untuk masyarakat memperoleh surat keterangan waris.

Untuk sosialisasi awal Aplikasi Sutera Wa (Surat Keterangan Waris) dilakukan secara internal, kemudian sosialisasi Aplikasi Sutera Wa dilakukan secara eksternal pada tanggal 29 Agustus 2019 sekaligus merupakan launcing Aplikasi Sutera Wa (Surat Keterangan Waris).

Aplikasi Sutera Wa (Surat Keterangan Waris) diharapkan mempermudah masyarakat dalam memperoleh surat keterangan waris dengan melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan melalui form upload dokumen, sehingga Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A lebih efektif dan efisien dalam menerbitkan surat keterangan waris.

Untuk melakukan pendaftaran online Sutera Wa ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu :

1. Registrasi

Pemohon melakukan registrasi melalui situs berikut  
<https://registrasi.pn-pontianak.go.id/>

## 2. Input Formulir

Pemohon mengisi data dan mengupload dokumen pada form yang telah disediakan di dalam Aplikasi tersebut

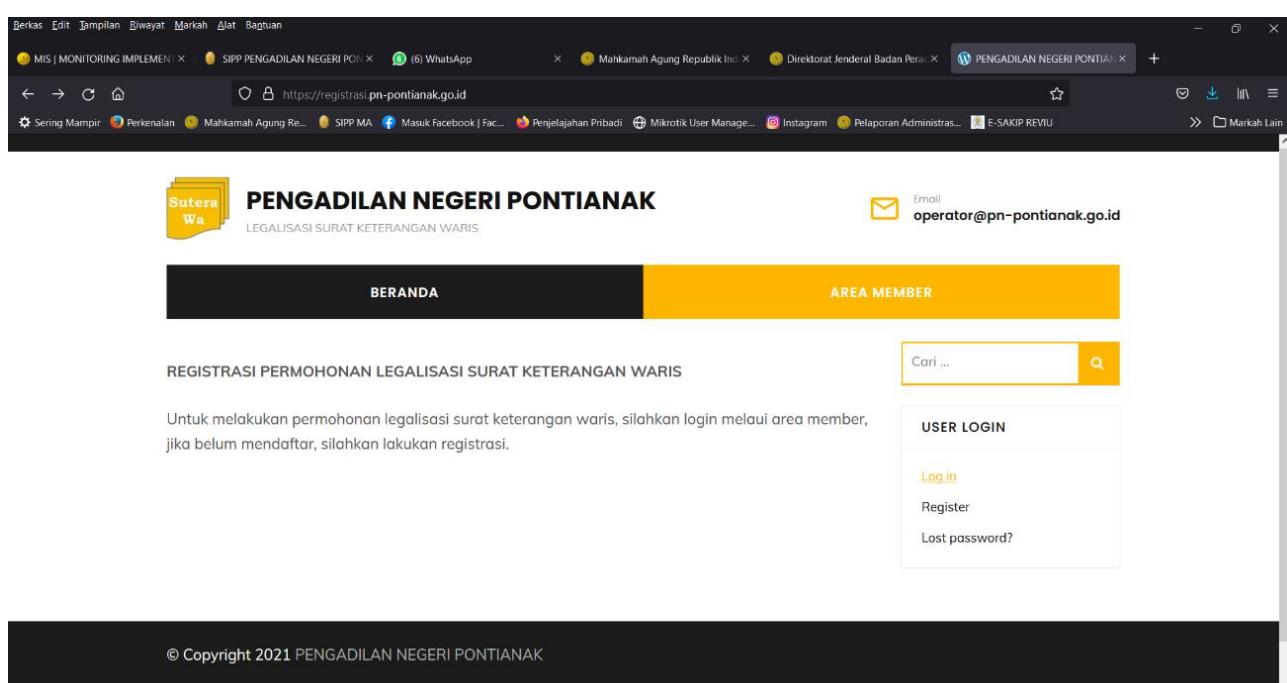
## 3. Notifikasi Email

Pemohon mendapatkan notifikasi *email* bahwa permohonan surat keterangan waris sudah diterima oleh Petugas Pengadilan Negeri Pontianak.

## 4. Datang ke Pengadilan

Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Pontianak dengan membawa dokumen asli yang sudah di upload ke PTSP bagian Kepaniteraan Hukum.

**Dalam pelaksanaannya di tahun 2021 telah dikeluarkan Surat Keterangan Waris sebanyak 15 Keterangan;**



Gambar 9 Screenshot Aplikasi Sutera WA

### ❖ Aplikasi Setara

Dalam mendukung Pelayanan Publik di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, Aplikasi Setara merupakan aplikasi untuk masyarakat memperoleh surat keterangan perkara.

Untuk sosialisasi awal Aplikasi Setara (Surat Keterangan Perkara) dilakukan secara internal, kemudian sosialisasi Aplikasi Setara dilakukan secara eksternal pada tanggal 15 Oktober 2020 sekaligus merupakan launching Aplikasi Setara (Surat Keterangan Perkara).

Aplikasi Setara (Surat Keterangan Perkara) diharapkan mempermudah masyarakat/badan hukum dalam memperoleh surat keterangan perkara dengan melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan melalui form upload dokumen, sehingga Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A lebih efektif dan efisien dalam menerbitkan surat keterangan perkara.

Untuk melakukan pendaftaran online Setara ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu :

1. Registrasi

Pemohon melakukan registrasi melalui situs berikut <https://setara.pn-pontianak.go.id/>

2. Input Formulir

Pemohon mengisi data dan mengupload dokumen pada form yang telah disediakan di dalam Aplikasi tersebut

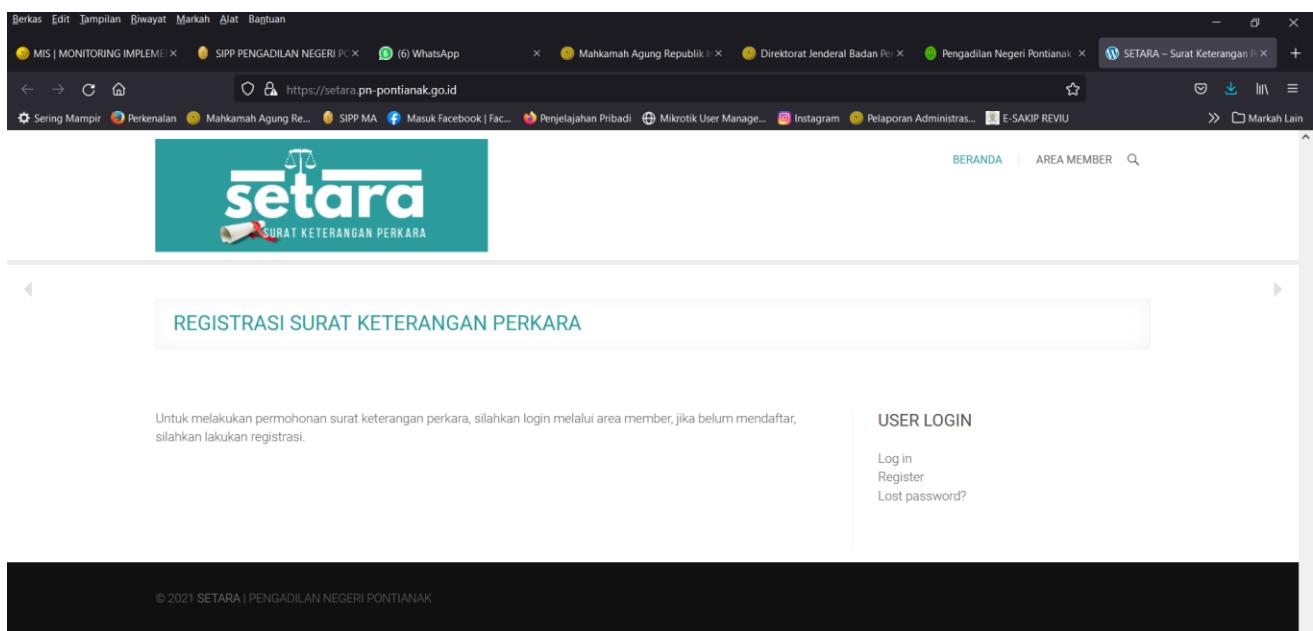
3. Notifikasi Email

Pemohon mendapatkan notifikasi *email* bahwa permohonan surat keterangan perkara sudah diterima oleh Petugas Pengadilan Negeri Pontianak

4. Datang ke Pengadilan

Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Pontianak dengan membawa dokumen asli yang sudah di upload ke PTSP Bagian Kepaniteraan Hukum.

## Dalam pelaksanaannya di tahun 2021 telah dikeluarkan Surat Keterangan Perkara sebanyak 17 Keterangan;



Gambar 10 Screenshot Aplikasi Setara

### ❖ **Aplikasi Survey Harian Pelayanan Pengadilan, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPA)**

Untuk mendukung peningkatan pelayanan publik sangat diperlukan adanya penilaian dari masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.

Penilaian dari masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A diharapkan adanya peningkatan dalam pelayanan sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan Pengadilan.

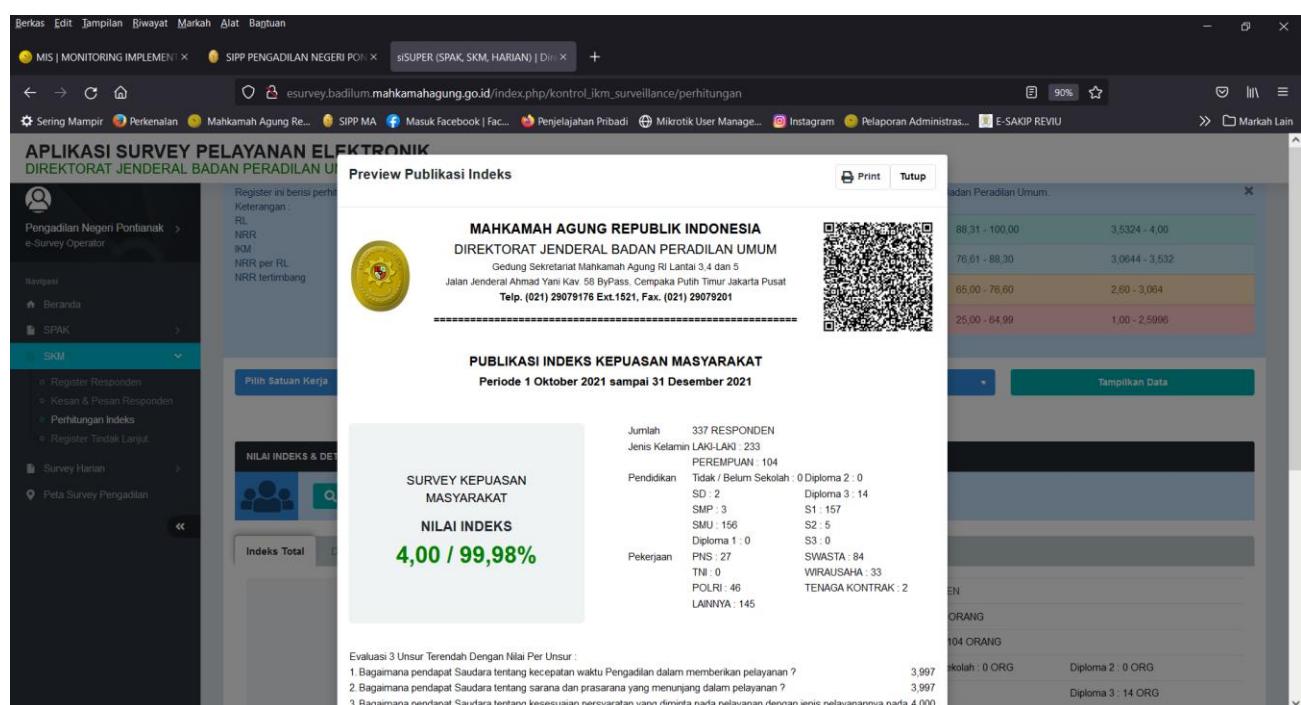
Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A telah membuat Inovasi berupa Aplikasi Survey Harian Pelayanan Pengadilan, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPA).

Aplikasi Survey Harian Pelayanan Pengadilan, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPA) telah disosialisasikan pada tanggal 6 November 2020 yang sekaligus merupakan launching penggunaan aplikasi tersebut.

Penggunaan Aplikasi Survey Harian Pelayanan Pengadilan, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang merupakan salah satu inovasi Pengadilan Negeri Pontianak tidak dipergunakan lagi setelah adanya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230/DJU/SK/M.H.02.3/4/2021 tanggal 8 April 2021 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (LENTERA), Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SiSUPER) Dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) Di Lingkungan Peradilan Umum.

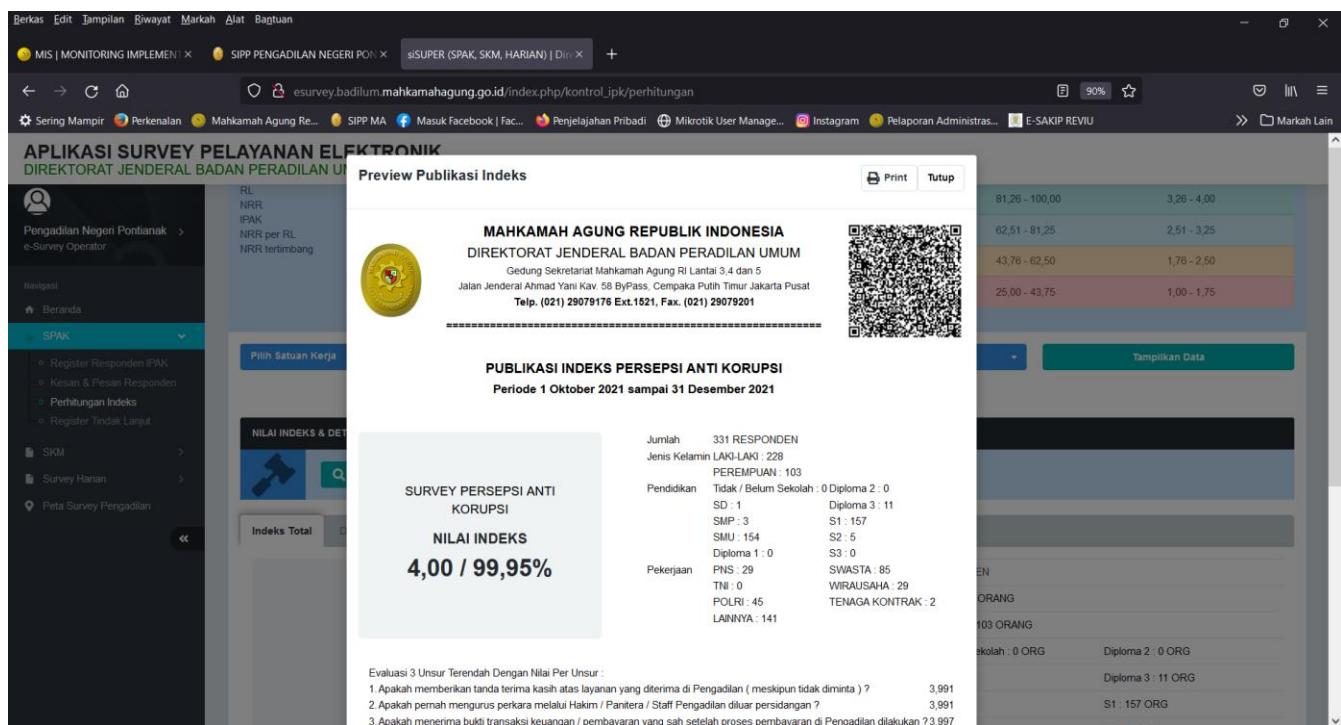
Sekarang pelaksanaan Survey Harian, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survey Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Pengadilan Negeri Pontianak sudah mempergunakan aplikasi **SiSUPER** dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

**Dalam pelaksanaannya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di tahun 2021 Pengadilan Negeri Pontianak telah disurvei oleh masyarakat sebanyak 337 Responden; Dengan hasil survey periode 1 Oktober-31 Desember 2021 adalah 4.00/99,98%**



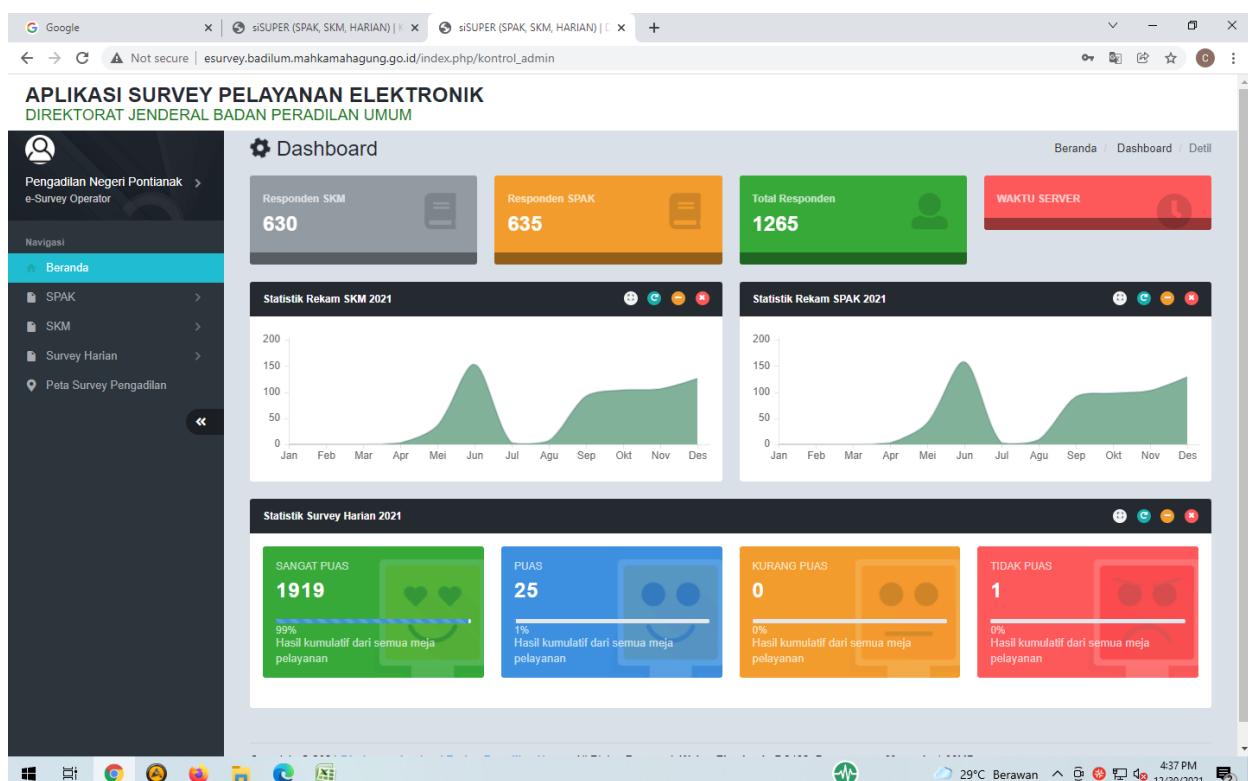
Gambar 11 Screenshot Survey Kepuasan Masyarakat

**Dalam pelaksanaannya Survey Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di tahun 2021 Pengadilan Negeri Pontianak telah disurvei oleh masyarakat sebanyak 331 Responden; Dengan hasil survey periode 1 Oktober-31 Desember 2021 adalah 4.00/99,95%**



Gambar 12 Screenshot Survey Persepsi Anti Korupsi

**Dalam pelaksanaannya Survey Harian di tahun 2021 Pengadilan Negeri Pontianak telah disurvei oleh masyarakat sebanyak 1.940 Responden; Dengan rincian sangat puas 1919, Puas 25, kurang puas 0 dan tidak puas 1;**



Gambar 13 Screenshot Dasboard SiSUPER

### ❖ Aplikasi Informasi Harian Pengadilan (INDI)

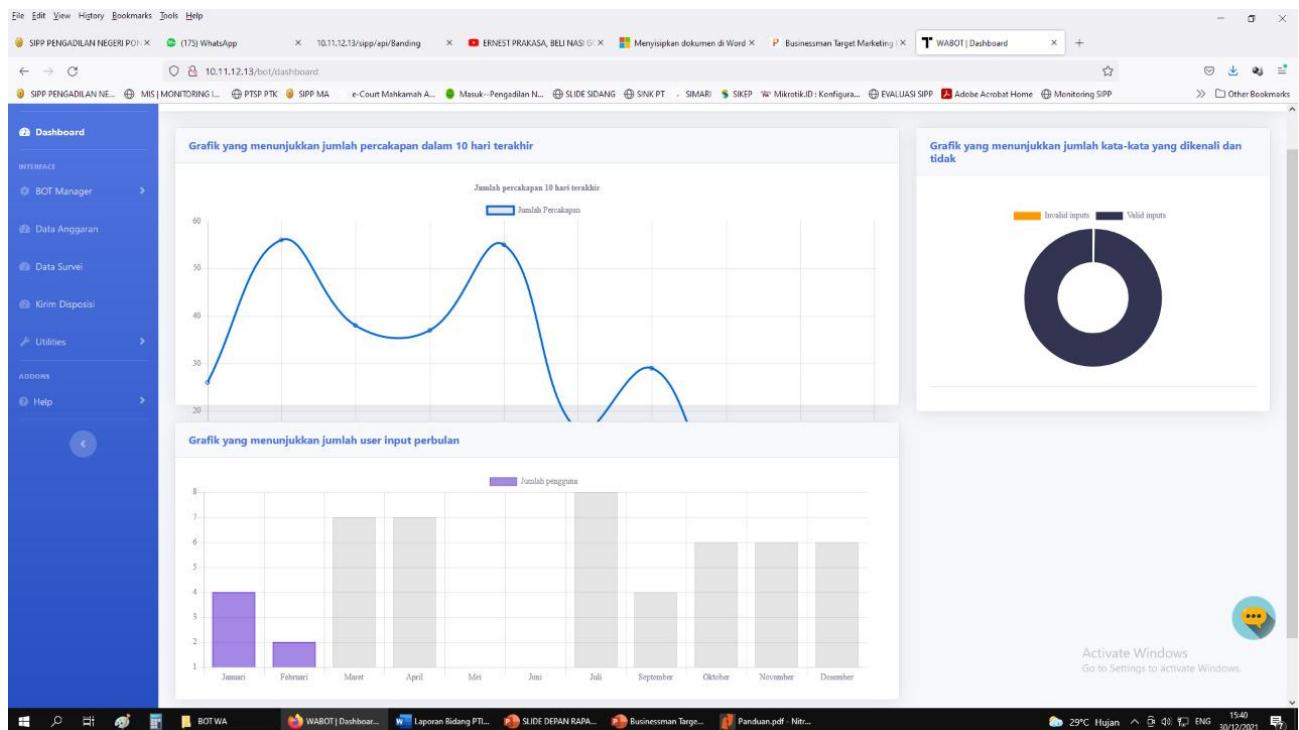
Aplikasi Informasi Harian Pengadilan (INDI) merupakan salah satu inovasi Pelayanan Publik yang berskala Internasional untuk memperoleh informasi yang diperlukan masyarakat dari Pengadilan Negeri Pontianak melalui aplikasi WhatsApp dimana saja kita berada.

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A telah mensosialisasikan Aplikasi Informasi Harian Pengadilan (INDI) pada tanggal 6 November 2020 yang sekaligus merupakan *launching* penggunaan aplikasi tersebut.

Penggunaan Aplikasi Informasi Harian Pengadilan (INDI) dengan mudah diakses oleh masyarakat untuk memperoleh informasi-informasi dari layanan pengadilan melalui aplikasi WhatsApp di nomor 081257758489 dengan cara mengetik "info", kemudian masyarakat akan mendapatkan pesan (berupa panduan atau arahan) untuk memperoleh informasi yang diinginkan.



Gambar 14 Poster Aplikasi INDI



Gambar 15 Dashboard Bot INDI Menunjukkan Jumlah Percakapan Yang Masuk

**Selain Pelayanan Publik dalam bentuk inovasi aplikasi Pengadilan Negeri Pontianak juga mengupayakan layanan Disabilitas dan layanan Umum lainnya.**

### Layanan Disabilitas

Pengadilan Negeri Pontianak berupaya meningkatkan Pelayanan Publik dengan cara memenuhi hak Difabel yang diantaranya dengan menyediakan sarana dan prasarana yaitu : Jalur Khusus Penyandang Disabilitas, Kartu Prioritas Disabilitas, Kursi Roda, Tongkat Bantu Jalan, Toilet Aksesibel dan pegangan rambat, Area tunggu kursi roda, dan Pintu Jalur Disabilitas.

Pada Pintu masuk Pengadilan Negeri Pontianak terdapat **Kursi Roda dan Juga Tongkat Bantu Jalan** yang selalu siap kapanpun jika ada pengunjung disabilitas yang datang ke Pengadilan.



Gambar 16 Kursi Roda dan Tongkat Bantu Jalan



Gambar 17 Toilet Khusus Penyandang Disabilitas

Pengadilan Negeri Pontianak juga memiliki **Toilet khusus** yang ramah untuk **Penyandang Disabilitas**. Di dalam toilet juga dilengkapi pegangan rambat dan juga tombol darurat jika sewaktu-waktu pengunjung memerlukan bantuan petugas.



Gambar 18 Toilet Disabilitas Dilengkapi dengan Pegangan Rambat

Pada Area Tunggu PTSP Pengadilan Negeri Pontianak juga dilengkapi dengan **tempat khusus antrean bagi pengguna kursi roda**.



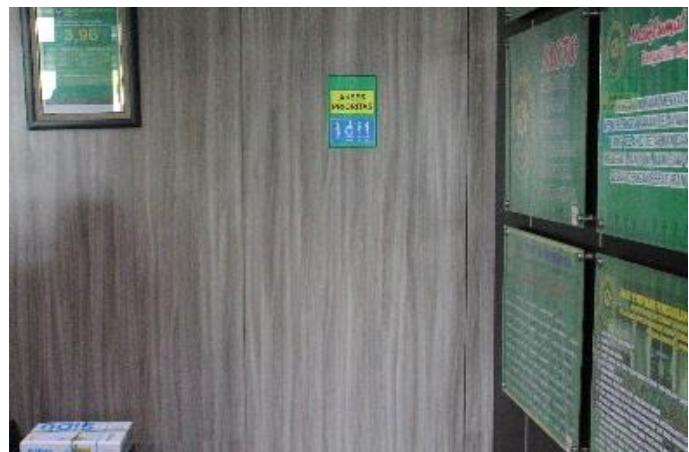
Gambar 19 Area Tunggu Kursi Roda



Gambar 20 Kartu Antrean Prioritas

Pengadilan Negeri Pontianak memiliki **kartu antrean khusus bagi kaum prioritas** seperti Pengunjung Usia Lansia, Ibu Hamil, Pengunjung Disabilitas, dan juga Ibu dengan Anak Bayi. Dengan adanya kartu tersebut dapat mempermudah petugas untuk memprioritaskan kenyamanan dan keamanan pengunjung tersebut.

Untuk meningkatkan kenyamanan bagi Pengunjung Prioritas, Pengadilan Negeri Pontianak memiliki **Pintu Akses Khusus Bagi Pengunjung Prioritas** agar tidak tercampur dengan pengunjung lain, dan mempermudah akses bagi Pengunjung Prioritas untuk menuju lokasi yang diinginkan di dalam gedung Pengadilan.



Gambar 21 Pintu Akses Prioritas

## Layanan Umum

Selain beberapa layanan bagi Pengunjung Disabilitas, Pengadilan Negeri Pontianak juga memiliki layanan-layanan pagi Pengunjung Pengadilan untuk meningkatkan kenyamanan Pengunjung.

**Ruang Tamu Terbuka** yang diperuntukkan bagi semua pihak luar yang akan bertemu dengan ASN Pengadilan.



Gambar 22 Ruang Tamu Terbuka



Gambar 23 Kompensasi Pelayanan

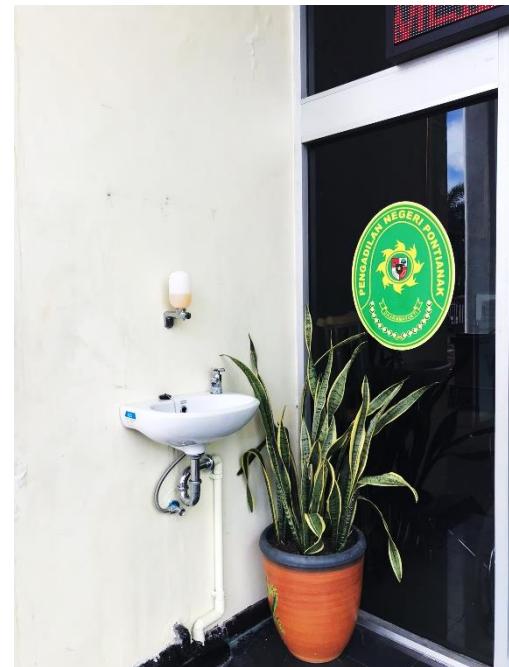
Untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi mengenai jenis-jenis pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Pontianak, maka disediakan **brosur-brosur** yang berisi **pelayanan** di setiap meja PTSP dan bisa dibawa pulang oleh pengunjung.

Sebagai bentuk komitmen pelayanan Pengadilan Negeri Pontianak kepada masyarakat, maka Pengadilan Negeri Pontianak menyediakan **Kompensasi Layanan** yang di berikan kepada masyarakat apabila pelayanan petugas Pengadilan tidak sesuai sop.



Gambar 24 Brosur Pelayanan PTSP

Sebagai upaya pencegahan Virus Covid-19, pada depan pintu utama Pengadilan Negeri Pontianak dilengkapi dengan **wastafel cuci tangan** bagi para pengunjung sebelum memasuki gedung Pengadilan.



Gambar 25 Wastafel Tempat Cuci Tangan Pengunjung

Selain wastafel tempat cuci tangan, Pengadilan Negeri Pontianak juga dilengkapi dengan **alat detektor suhu** bagi para pengunjung.

Gambar 26 Alat Detektor Suhu

Pengadilan Negeri Pontianak memiliki **Ruang Kesehatan dan Laktasi** bagi pengunjung yang membutuhkan. Sebelum menggunakan ruangan ini, pengunjung harus memberitahu petugas untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung.



Gambar 27 Ruang Kesehatan dan Laktasi

Pengadilan Negeri Pontianak menyediakan **air minum gratis** bagi pengguna layanan.



Gambar 28 Air Minum Gratis



Gambar 29 Kotak Saran

Pengadilan Negeri Pontianak menyediakan akses **WiFi gratis** bagi pengunjung, sehingga pengunjung bisa mengakses informasi yang dibutuhkan di internet.



Gambar 30 Pemberitahuan Akses WiFi Gratis

Selagi menunggu layanan, Pengunjung bisa menikmati **Ruang Pojok Baca** yang dilengkapi dengan buku-buku dan juga **TV Informasi** yang menyediakan informasi seputar Pengadilan.



Gambar 31 Ruang Pojok Baca dan TV Informasi



Gambar 32 Box Charger bagi Pengunjung

**Box charger** disediakan dalam memenuhi kebutuhan bagi pengguna layanan apabila memerlukan, tersedia juga kotak pengaduan manual dan penilaian/survei manual.

Di dalam Lobby Utama gedung Pengadilan disediakan **Denah dan Jalur Evakuasi** dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengguna layanan, agar pengunjung bisa mengetahui ruang publik apa yang ada di gedung Pengadilan sekaligus petunjuk arah untuk menuju ke lokasi yang dituju.



Gambar 33 Denah dan Jalur Evakuasi

## **BAB VI**

# **PENGAWASAN**

---

### **A. INTERNAL**

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

#### **a. Maksud Pengawasan :**

- ❖ Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaran teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ❖ Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- ❖ Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidak efisienan penyelenggaraan peradilan.
- ❖ Untuk menilai kinerja Aparatur Sipil Negara.

#### **b. Tujuan Pengawasan :**

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

#### **c. Fungsi Pengawasan :**

- ❖ Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- ❖ Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- ❖ Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya berperkara yang murah.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, termasuk Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A, yang berwenang dan bertanggung-jawab dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Melekat adalah:

- ❖ Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama.
- ❖ Seluruh Pejabat Kepaniteraan.
- ❖ Seluruh Pejabat Struktural.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri selaku Pimpinan Pengadilan bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Tugas Pengawasan dengan mengkoordinir para Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pada Pengadilan Negeri Pontianak, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : W17-U1/3613/HK.00.8/10/2021, tertanggal 27 Oktober 2021, tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, hakim-hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas Bidang adalah sebagai berikut :

NO.	BIDANG PENGAWASAN	NAMA/NIP
1.	Sebagai Penanggung Jawab	PRANSIS SINAGA, S.H., M.H. NIP.19630224 199212 1 001
2.	Koordinator Pengawasan Bidang	H. AKHMAD FIJARSYAH JOKO SUTRISNO, S.H., M.H. NIP.19711101 199303 1 002
3.	Hakim Pengawas Bidang Pidana	1. KURNIA DIANTA GINTING, S.H., M.H. NIP. 19781206 20011 2 001 2. Dr. NOVA YUNIARTI, S.Pi, M.P.
4.	Hakim Pengawas Bidang Perdata	1. IRMA WAHYUNINGSIH, S.H., M.H. NIP. 19720913 199903 2 003 2. EFENDY HUTAPEA, S.H.
5.	Hakim Pengawas Bidang Hukum	1. NIKO HENDRA SARAGIH, S.H., M.H. NIP. 19780721 200502 1 001

		<b>2. AGUS SUSIANTO, S.H., M.H.</b>
<b>6.</b>	<b>Hakim Pengawas Bidang Tipikor</b>	1. RETNO LASTIANI, S.H., M.H. NIP. 19780308 200112 2 002 2. PRANA JAYA, S.H.
<b>7.</b>	<b>Hakim Pengawas Bidang PHI</b>	1. DEWI APRIYANTI, S.H., M.H. NIP. 19780411 200212 2 002 2. HERIANTO SINAGA, S.H., M.H.
<b>8.</b>	<b>Hakim Pengawas Bidang Perikanan</b>	1. YAMTI AGUSTINA, S.H. NIP. 19780411 200212 2 002 2. EDI UTOMO, S.H., M.H.
<b>8.</b>	<b>Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan</b>	1. TRI RETNANINGSIH, S.H. NIP. 19740902 199903 2 002 2. Dr. URIF SYARIFUDIN, A.Pi., M.T.A.
<b>9.</b>	<b>Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana</b>	1. RENDRA, S.H., M.H. NIP. 19760103 200112 1 004 2. ATUN BUDI ASTUTI, S.H.
<b>10.</b>	<b>Hakim Pengawas Bidang Perencanaan Teknologi Informasi dan Laporan</b>	1. MOCH. ICHWANUDIN, S.H., M.H. NIP. 19760113 200012 1 001 2. SITI UMI AKHIROKH, S.H., M.H.
<b>11.</b>	<b>Hakim Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)</b>	RICHMOND P.B. SITOROES, S.H., M.H. NIP. 19730409 199903 1 001
<b>12.</b>	<b>Hakim Pengawas Manajemen Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)</b>	ASIH WIDIASTUTI, S.H. NIP. 19781206 200112 2 001
<b>13.</b>	<b>Hakim Wasmat</b>	RENDRA, S.H., M.H. NIP. 19760103 200112 1 004

Gambar 34 Data Hakim Pengawas Bidang

## **B. EVALUASI**

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak secara rutin melakukan Evaluasi kinerja aparatur Pengadilan Negeri Pontianak melalui Briefing atau Rapat Bulanan yang selalu dilaksanakan tiap bulannya. Rapat bulanan selain untuk Evaluasi kinerja, juga difungsikan sebagai wadah untuk membahas mengenai segala hambatan dalam pelaksanaan tugas untuk kemudian didiskusikan dalam rapat untuk mencari solusi yang terbaik yang dapat menunjang kelancaran tugas-tugas dalam organisasi Pengadilan Negeri Pontianak serta juga bermanfaat untuk silaturahmi untuk membangun kebersamaan antar keluarga besar Pengadilan Negeri Pontianak.



## **BAB VII**

## **PENUTUP**

---

### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Pontianak hingga saat ini sudah berjalan dengan baik, namun terdapat kekurangan dari segi Sarana Prasarana maupun minimnya jumlah Sumber Daya Pendukung;
2. Penyerapan Realiasi Anggaran sebagai mana data yang telah kami paparkan diatas cukup baik, dimana penyerapan Anggaran secara keseluruhan untuk DIPA-01 yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung mencapai: 98,99%, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung mencapai: 98,14% sedangkan DIPA-03 yang terdiri dari Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum mencapai: 99,04% ;
3. Pemanfaatan dari Realisasi Anggaran dalam mendukung Pelaksanaan Tugas Teknis dan NonTeknis Pengadilan Negeri Pontianak dapat dikatakan cukup baik, dilihat dari terpenuhinya dan terlaksananya tugas Teknis dan Non Teknis Pengadilan Negeri Pontianak dengan capaian kinerja yang melebihi target yang ditetapkan.
4. Pada tanggal 16 Oktober 2020 Pengadilan Negeri Pontianak telah melaksanakan kegiatan Assesment Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum secara online dan berhasil mempertahankan predikat A-“Excellent”.
5. Pada tanggal 18 Desember 2020 Pengadilan Negeri Pontianak mendapat piagam penghargaan dari Komisi Perlindungan Dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalimantan Barat, atas kerjasama dan komitmennya dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Anak di Provinsi Kalimantan Barat.

6. Pada Tahun 2020 Pengadilan Negeri Pontianak telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diserahkan secara online oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Tanggal 21 Desember 2020.

## **B. REKOMENDASI**

Melihat dari kekurangan dan hambatan yang ada, kami membuat rekomendasi diantaranya:

1. Dari data Personil Sumber Daya Manusia antara Tenaga Teknis dan Nonteknis Peradilan sebagaimana yang telah diuraikan di atas proposinya tidak sebanding, perlu penambahan tenaga non teknis dalam mendukung tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik.
2. Penambahan Sarana Teknologi Informasi.
3. Perlu dukungan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada.
4. Perlu adanya rehabilitasi gedung Kantor Pengadilan Negeri Pontianak mengingat semakin banyaknya perkara yang masuk dan jumlah masyarakat pencari keadilan semakin meningkat sehingga dengan keadaan gedung kantor yang sekarang tidak memadai serta diperlukannya area steril untuk hakim dengan keadaan gedung kantor yang belum prototype masih belum bisa membuat area yang benar-benar steril untuk hakim.
5. Dengan kondisi gedung kantor yang sudah tua memerlukan anggaran pemeliharaan gedung kantor yang memadai.

[DOWNLOAD LAPORAN](#)

MEDIA SOSIAL  
PN PONTIANAK



## LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS 1 A

 Jalan Sultan Abdurrahman No. 89 Pontianak

 (0561) 734100, FAX. (0561) 763214, 763196

 pengadilannegeriptk@gmail.com

 0813 5048 5634 (Layanan Pengaduan)

 0812 5775 8489 (INDI Whatsapp Bot)